

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana ialah suatu rangkaian kejadian yang dapat mencelakai dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia, bencana disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor alam, faktor non alam dan faktor manusia, bencana juga dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan berdampak pada psikologis seseorang (UU Nomor 24 Tahun 2007).

Akhir tahun 2019, tepatnya di China, Kota Wuhan merupakan tempat ditemukannya pertama kali Virus baru yakni *Coronavirus disease that was discpvered in 2019* atau yang biasa dikenal dengan Covid-19. Covid-19 muncul dengan mencuri perhatian dunia, WHO (*World Health Organization*) berkata bahwa “virus Covid-19 merupakan virus yang memiliki resiko besar, kategori virus ini lebih meresahkan dibanding dengan virus sebelumnya yaitu SARSCoV serta Mers-CoV.”

Covid-19 masuk dalam golongan bencana Non-alam yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020. Gejala Covid-19 dapat timbul apabila tersebarnya tetesan berupa cairan serta virus yang dapat melekat pada barang disekitar manusia dan bertahan hingga beberapa jam. Hal terparah yang akan terjadi jika virus tertular pada manusia yaitu kematian. Virus Covid-19 telah banyak menelan korban jiwa baik balita

hingga manula, tetapi korban yang lebih banyak tidak terselamatkan yaitu manula (Manusia lanjut usia), karena manula biasanya mempunyai penyakit komplikasi yang membuat imunitas tubuh semakin melemah hingga tidak kuat untuk bertahan dari virus Covid-19. Berikut merupakan persebaran virus *Covid-19* di Asia Tenggara menurut WHO (*World Health Organization*)

Tabel 1 Persebaran Virus Covid-19 di Asia Tenggara

No	Negara	Total Kasus	Total Kematian
1.	Indonesia	1.492.00240	40.364
2.	Filipina	712.442	13.159
3.	Jepang	446.849	9.031
4.	Myanmar	142.377	30
5.	Singapura	60.288	4.848

Sumber : <https://covid19.who.int/table> / 28 Maret 2021

Pada bulan Februari 2021, Negara Indonesia berada di urutan pertama dengan total kasus dan total kematian terbanyak. Bertambahnya pasien Covid-19 di Indonesia sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan gerak Pemerintah yang sangat lamban sejak pertama kali virus ini muncul di Indonesia. Masyarakat juga harus terus *up to date* terkait data-data ataupun informasi yang selalu di keluarkan oleh Pemerintah, karena masyarakat wajib mengetahui perkembangan tentang Covid-19 untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah telah merespon beberapa penanganan baik dalam aspek kesehatan maupun ekonomi. Presiden RI meluncurkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Terdapat beberapa landasan hukum dalam upaya penanggulangan wabah yang diberikan, Pemerintah telah menerapkan beberapa regulasi diantaranya :

1. Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
2. Maklumat Lurah Desa Panggunharjo nomor 360/097 tentang kewajiban lapor bagi Penduduk Desa Panggunharjo.
3. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan Presiden pada tanggal 31 Maret 2020.
8. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19

Tabel 2 Persebaran Virus Covid-19 di Pulau Jawa

Nama Provinsi	Konfirmasi	Sembuh	Meninggal
DKI Jakarta	379.692	365.534	6.301
Jawa Timur	138.715	126.809	9.828
Jawa Barat	246.786	218.939	3.135
Jawa Tengah	167.276	123.939	7.207
Daerah Isimewa Yogyakarta	32.811	26.865	794

Sumber : <https://covidn.id/> / 28 Maret 2021

Dalam tabel diatas menjelaskan bahwa pada pulau Jawa, Kota Yogyakarta memiliki jumlah pasien paling sedikit terjangkit Virus Covid-19. Kasus terbanyak berasal dari DKI Jakarta, hal ini terjadi karena DKI Jakarta merupakan Ibu kota negara yang mana sebagian besar menjadi tempat bagi para perantau mencari pekerjaan di Jakarta. Belum adanya struktur dan integritas yang baik dari penanganan Covid-19 membuat aktifitas buruh menjadi terganggu, banyaknya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masal, pengangguran dan orang yang kehilangan pemasukan kembali ke kampung halaman masing-masing, karena mereka beranggapan bahwa dengan kembalinya mereka ke kampung halaman dapat meringankan biaya hidup sehari-hari dan melanjutkan pekerjaan di kampung halaman.

Pada kasus serupa terjadilah lonjakan besar karena orang-orang yang mulai kembali ke Desa menjadikan virus Covid-19 cepat menyebar di lingkungan Desa. Terdapat juga masalah lain yang timbul akibat tersebarnya Covid-19 di desa. Beberapa desa yang biasa menjadi penyokong bahan-bahan pangan yang menyediakan untuk Kota juga akan ikut terancam hal tersebut akan menimbulkan adanya krisis pangan secara menyeluruh. Lantas dengan adanya upaya pembatasan sosial (*social distancing*) maka semakin membuat warga mengalami krisis ekonomi di level keluarga. Krisis yang muncul ini biasanya akan terus merembet sampai

daya beli ekonomi keluarga, psikis setiap orang di desa, bahkan menimbulkan krisis social karena tidak adanya lagi gotong royong atau kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh warga desa.

Banyak kerugian yang telah ditimbulkan karena meningkatnya pasien Covid-19. Dengan adanya peningkatan ini, Pemerintah Kota terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Desa agar terus menghimbau dan melaksanakan tugas dengan berkoordinasi hingga RT/RW sekitar lingkungan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang semakin melonjak di Desa.

Tabel 3 Data Pasien Covid-19 Perkabupaten di DIY Yogyakarta

Kabupaten	Dirawat	Meninggal	Sembuh
Yogyakarta	2.690	148	2.962
Sleman	5.194	156	6.331
Bantul	4.714	150	4.726
Kulon Progo	2.531	27	1.004
Gunung Kidul	1.102	57	1.068

Sumber: <https://corona.jogjaprov.go.id> / 28 Maret 2021

Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak kedua setelah Kabupaten Sleman. Berikut merupakan data pasien yang berada di Kabupaten Bantul.

Tabel 4 Data Pasien Covid-19 Per-Kecamatan di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus	Sembuh	Meninggal
1.	Sewon	904	877	27
2.	Banguntapan	795	772	23
3.	Kasih	624	621	21
4.	Bantul	413	400	13
5.	Jetis Bantul	325	371	8

Sumber : <https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik> / 28 Maret 2021

Dalam Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Sewon merupakan Kecamatan dengan jumlah pasien meninggal terbanyak di Kabupaten Bantul. Banyaknya pasien meninggal yang ada di Kecamatan Sewon juga berarti banyaknya warga desa yang terdampak atas terjadinya pandemi Covid-19 disetiap kelurahan. Berikut merupakan jumlah pasien pada Kecamatan Sewon :

Tabel 5 Data Pasien Covid-19 di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul

No	Kelurahan	Jumlah Kasus	Sembuh	Meninggal	Isolasi
1.	Panggungharjo	600	569	14	17
2.	Bangunharjo	330	283	12	35
3.	Pendowoharjo	313	294	10	9
4.	Timbulharjo	185	168	6	11

Sumber :<https://kec-sewon.bantulkab.go.id/> 25 Maret 2021

Terlihat pada tabel diatas bahwa Desa Panggungharjo menempati posisi pertama dengan banyaknya pasien yang meninggal, sehingga kini dapat disadari bahwa Desa tidak hanya berperan sebagai “bentang alam” yang tampak dari ketahanan pangan, air bersih, dan udara yang bersih, tetapi juga “bentang hidup” berupa pranata sosial (*socialware*) yang mampu menyokong masyarakat desa menghadapi berbagai kondisi sulit.

Sejak saat itu, desa mulai harus mentransformasikan diri dengan berada di garda terdepan pengaman bagi warganya, desa menjadi ujung tombak untuk menangani covid-19, penanganan pandemi Covid-19 juga akan lebih efektif jika dimulai dari tingkat desa. Banyak desa-desa yang sudah mulai mandiri berinisiatif untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19.

Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid dan Pelaksanaan Padat Karya Tunas Desa dengan menggunakan Dana Desa. Terdapat salah satu desa yang sukses menciptakan penanganan dari adanya dampak pandemi Covid-19 secara kreatif dan berbeda dengan desa-desa lainnya dengan meluncurkan suatu aplikasi tanggap Covid-19 yaitu Desa Panggungharjo.

Desa Panggungharjo memiliki inovasi program Merdesa yang merupakan suatu fokus terhadap kebudayaan sosial yang diperlukan untuk menyongsong “New Normal” di masa mendatang. Wahyudi Anggoro Hadi selaku Kepala Desa (Lurah) menyatakan bahwa “Merdesa bagaikan salah satu wujud dari suatu kehadiran negara dipertemukan oleh kebudayaan sosial, selanjutnya Pemerintah Desa mencoba untuk mengkombinasikan kapasitas politik dan birokrasi yang ada di Pemerintah Desa dan kapasitas social di warga desa.” (Nugraheny. Nasional.kompas.com, diakses 20 November 2020). Merdesa merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mewujudkan program yang dibutuhkan warga desa pada saat dalam masa pandemi, merdesa ini menggambarkan tentang Desa sebagai suatu tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut menjadi Kawasan yang merdeka serta berdaulat.

Tepat pada tanggal 16 Maret 2020 Pemerintah Desa Panggungharjo membentuk suatu satuan gugus tugas yaitu Panggung Tanggap Covid-19 atau yang biasa disingkat PTC-19. PTC-19 dibentuk guna membantu Pemerintah Desa dalam masa pandemi Covid-19 untuk melakukan suatu penanganan dan pengurangan

dampak akibat Covid-19. Wahyudi Anggoro Hadi beserta pihak lain yang berada di Desa Panggungharjo bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat desa bahkan saat dalam masa pandemi Covid-19.

PTC-19 memiliki anggota yang didalamnya terdapat Pemerintah Desa, aparat, relawan dan masyarakat Desa. Dalam mewujudkan suatu desa yang sejahtera bahkan dalam masa pandemi, Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) membentuk suatu sistem pendataan yang terdiri dari “Lapor dan dukung”. Lapor dan Dukung dapat diakses melalui situs resmi Desa “*panggungharjo.desa.id*” dalam lapor digunakan untuk menangani dampak-dampak yang sering sekali muncul seperti dampak klinis dan nonklinis (ekonomi dan sosial). Sedangkan dalam dukung yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang ikut andil dalam membantu penanganan dampak Covid-19, dapat berupa uang, sembako, masker, dan lain-lain.

Kegiatan Pemerintah Desa yang juga menunjang adanya pengurangan dampak Covid-19 dalam aspek kesehatan diantaranya dibuat suatu Shelter Tangguh Covid-19, sedangkan pada ekonomi ialah dengan dibentuknya suatu *platform e-commerce* yang diinisiasi oleh PTC-19 dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari, Desa Panggungharjo. Platform “Pasardesa.id” diluncurkan pertama kali pada tanggal 13 April 2020 oleh Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Pasardesa.id dibuat guna menjembatani antara barang-barang persediaan yang terbatas ditoko dan warung yang ada di Desa Panggungharjo serta guna mencukupi kebutuhan ekonomi warga dengan menjual hasil pertanian atau perkebunan melalui

platform dan akan dipasarkan secara *online* sehingga daya beli dan cadangan ekonomi masyarakat yang sudah tipis tidak mengalir keluar, tetapi ke toko atau warung tetangga, kemudian terjadilah perputaran ekonomi.

Pada 5 Oktober 2020 , pasardesa.id mendapatkan apresiasi dari Indonesia Smart Nation Award sebagai salah satu inovasi dalam pemulihan ekonomi yang menghasilkan omset sebanyak 1,7 Miliar dalam kurun waktu 7 bulan, antara 13 April sampai 28 Oktober 2020 (suaramerdeka.news, diakses pada 23 November 2020), tetapi dalam pengimplementasiannya, masih ditemukan beberapa kendala.

Penelitian ini dibuat untuk meninjau sejauh mana proses implementasi kebijakan program Merdesa yang dijalankan guna mengurangi dampak Covid-19 yang bekerjasama dengan PTC-19. Selain itu untuk menciptakan informasi yang muncul secara perdana terkait ide-ide yang dimunculkan dalam kegiatan Pemerintah Desa yang ada di Panggungharjo. Dalam uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Merdesa dalam Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Merdesa dalam Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Merdesa dalam Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu hingga memperkaya wawasan sehingga dapat membantu adanya pengurangan dampak akibat Covid-19, dapat juga menjadi contoh yang baik untuk desa maupun kota yang masih kurang cerdas menghadapi virus Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat agar tetap terciptanya lingkungan masyarakat yang nyaman dan sehat mengharuskan warga mengetahui terkait adanya virus Covid-18. Selain itu pula dengan mengetahui implementasi kebijakan dalam penanganan dampak Covid-19 dapat menjaga kesejahteraan masyarakat di Desa.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian (Fatimah, A. S., 2020) membahas tentang Implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tasikmalaya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tiga cara yaitu : observasi, *depth interview*, dan dokumentasi. Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara legal telah diberlakukan dalam dunia pendidikan pada masa pandemi virus Corona

Disease (Covid 19) kebijakan tersebut sudah digunakan di Kota Tasikmalaya, dalam mengukur keberhasilan suatu penyelenggaraan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa Pandemi Virus *Corona Disease* (Covid-19) di Kota Tasikmalaya sudah dilakukan dengan cukup baik, namun dimensi komunikasi dan sumber daya harus lebih ditingkatkan kembali. Sedangkan dimensi struktur birokrasi dan disposisi tetap dipertahankan

Penelitian yang dilakukan oleh (Yunus & Rezki, 2020) menuliskan tentang kemunculan wabah virus corona menyebabkan kekhawatiran di seluruh negara, tanpa terkecuali negara indonesia. Virus corona terindikasi pertama kali berasal dari Kota Wuhan Cina lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mulanya pemerintah belum mengikuti prosedur penanganan dan penanggulangan mengatasi wabah virus Corona seperti di beberapa negara yang telah menerapkannya terlebih dahulu. Alasannya karena masyarakat dapat terhindar dari segala jenis berita hoax yang beredar dan nantinya justru menimbulkan kekhawatiran yang berlebih. Hingga pada akhirnya wabah corona menjadi hal yang serius di negara ini, terbukti dengan terus bertambahnya jumlah korban yang terus meningkat setiap harinya. Pemerintah menerapkan kebijakan lockdown selama 14 hari untuk mengatasi penularan wabah virus Corona. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat yang besar terhadap virus corona, sehingga diperlukannya penanganan dan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agung, 2020) membahas tentang penyebaran Covid-19 secara terus menerus dan makin meluas ke seluruh negara mengakibatkan dampak yang serius, salah satunya pada kehidupan sosial manusia yakni psikologi dan perilaku manusia. Pandemi Covid -19 telah menyebabkan bias kognisi sosial dan mempengaruhi emosi serta perubahan perilaku pada individu. Dibutuhkannya peran aktif para pemerintah dalam menangani permasalahan penyebaran covid-19 dan mengupayakan mitigasi yang tepat, karena wabah ini tidak hanya membawa dampak buruk ke perekonomian saja akan tetapi pada kondisi psikolog manusia juga.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan, B., 2017) merupakan penelitian desan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan fenomena implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal RSUD Indata Provinsi Sulawesi Tengah. SPM (Standar Pelayanan Minimal) merupakan suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan SPM terlihat dari empat aspek yang dikemukakan oleh Edward III bahwa komunikasi belum berjalan dengan baik karena pelaksanaannya belum dilakukan secara jelas dan konsisten hingga berdampak pada tujuan kebijakan. Aspek sumber daya manusia terlihat bahwa karyawan berkompeten dan memiliki fasilitas yang cukup memadai. Aspek disposisi yang terdiri dari sikap dukungan dan tingkah laku implementor menunjukkan peningkatan yang baik. Begitu pula dalam Struktur Birokrasi yang memiliki SOP (*Standar Operational Procedur*) yang

telah diikuti dengan tepat, namun hanya perlu meningkatkan konsistensi dengan aturan yang lebih ketat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, E., 2020) membahas tentang Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Sampang menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumen digital, berita online, dan situs resmi Pemerintah Kabupaten Sampang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa untuk pandemi Covid-19 berjalan cukup baik. Faktor yang mendukung keberhasilan dimensi komunikasi adalah sosialisasi program dan informasi tentang pandemi Covid-19 berjalan secara optimal. Kemudian dimensi lain yaitu struktur birokrasi, koordinasi antar pelaksana cukup intensif, hubungan yang terjadi bersifat kolaboratif antara pelaku kebijakan atau pelaksana. Faktor penghambat muncul dari dimensi sumber daya karena terbatasnya anggaran dana desa dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sampang sehingga infrastruktur yang kurang memadai guna mencegah penyebaran virus corona.

Penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan, V. E., 2021) Meneliti tentang Implementasi Kebijakan new normal Aparatur sipil negara di Lipi Bandung. Instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden RI tentang adanya kebijakan new normal bagi aparatur negara dalam implementasinya mengalami kendala dalam sumber daya manusia, karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengatur kerjaan bahkan dalam kecepatan menyelesaikann pekerjaan, karena hal tersebut juga berpengaruh untuk kualitas pekerjaan. Maka, dibutuhkan pelatihan bagi ASN

yang mengalami kendala dalam kerjaan baik aplikasi, transfer ilmu hingga membuat rencana peningkatan kinerja, agar selalu bersikap tegas ke ASN dan ASN dapat segera menyelesaikan tugas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Darmalaksana et al., 2020) berisikan tentang kegiatan work from home yang dilakukan saat masa pandemi memaksa masyarakat melek akan perkembangan teknologi, penggunaan media seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Google Classroom* dalam menunjang kegiatan proses pembelajaran ataupun kegiatan kantor. Pada saat pandemi kegiatan diluar rumah memang dibatasi dan akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk “*Work From Home*”, kegiatan ini ditujukan untuk anak sekolah, mahasiswa, dan para pegawai. Pembelajaran yang dilaksanakan melalui daring menjadi salah satu hal yang efektif dilakukan pada saat pandemi.

Peneliti (Retnaningsih, H., 2019) meneliti tentang adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang dibuat oleh Menteri Pendidikan tertuju pada siswa-siswa kalangan miskin hal tersebut berguna untuk memberikan suatu keadilan, hingga terbentuklah kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan yaitu PIP. Penelitian ini ditulis menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Kedua kota dipilih sebagai unit analisis karena termasuk wilayah yang menerima bantuan PIP terbanyak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang belum optimal, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal berupa pemaksaan nama-nama siswa yang harus diberi bantuan.

Peneliti (Mulyani et al., 2020) menuliskan tentang PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) diterapkan di Indonesia agar pemerintah dapat memutus peningkatan Covid-19. PSBB berakhir dengan menurunnya nilai ekonomi di Indonesia. Cara untuk menangani pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Majalengka merumuskan beragam peraturan mulai dari Penetapan Status Siaga Darurat sampai dengan Pemberlakuan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru), akan tetapi dibuatnya AKB ini belum dapat meredam adanya penyebaran Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah pasien terjangkit Covid-19 yang terus meningkat setiap harinya. Analisis sementara bahwa kesadaran masyarakat Majalengka pada umumnya masih rendah diarekan minimnya pemahaman bahkan acuh terhadap dampak dari virus Corona.

Penulis (Nurhalimah, 2020) menjelaskan bahwa demi menjaga keutuhan negara, berbagai elemen sangat dibutuhkan, suatu kebijakan dalam keadaan darurat yang dikeluarkan pemerintah berupa *social distancing* dan pemberlakuan lockdown merupakan salah satu cara memperkecil tersebarnya virus. Walaupun dalam pengimplementasiannya pasti banyak merugikan berbagai pihak dalam bidang ekonomi. Kerjasama pemerintah dan masyarakat tanpa batasan agama, kalangan dan profesilah yang dapat mewujudkan kesejahteraan social dan kesehatan.

Pada penelitian (MAUNDE, R., POSUMAH, J., & KOLONDAM, H., 2021) Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian menyebutkan bahwa implementasi

penanggulangannya memiliki hasil yang baik yaitu dalam Proses komunikasi sudah terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, tapi masih kurang untuk masyarakat, dalam kualitas sumberdaya aparatur pemerintah Desa Kuma belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi kebijakan penanggulangan covid – 19, dalam disposisi (komitmen konsistensi) aparat pemerintah Desa Kuma pemerintah kecamatan Essang Selatan dan Pemerintah Kabupaten cukup baik dalam implementasi tapi kurangnya komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan Covid-19, Struktur birokrasi melalui mekanisme prosedur dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid – 19 berjalan dengan baik tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program karena semua dilakukan secara terkoordinasi.

Pada penelitian (Wanimbo, P., Aedah, N., & Sapioper, H. C., 2020) membahas tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas penting dioptimalkan guna menopang pelaksanaan percepatan pembangunan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, dengan fokus kajian pada implementasi kebijakan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan SDM. Paradigma penelitian ini kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan SDM Dinas Kesehatan Yahukimo dengan mode Edward III menunjukkan, komunikasi dan petunjuk kebijakan pengembangan SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo telah berjalan dengan baik. Relasi tersebut terbangun dari garis hirarki kepala dinas kepada bidang terkait. Kepala dinas mempercayakan kepala bidang SDK Teknis

melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman dan petunjuk. Sumber daya Dinas Kesehatan sangat kekurangan.

Penulis (Budastra, 2020) menjelaskan dalam tulisannya bahwa penyakit Corona virus atau yang sering disebut Covid-19 yang bermula di Kota Wuhan-Cina, pada bulan Desember 2019, telah menyebar ke segala penjuru negara di dunia, termasuk di Kabupaten Lombok Barat-Indonesia. Respon cepat penanggulangan penyebaran Covid-19 memberi dampak yang negatif terhadap perekonomian dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Covid-19 membawa dampak yang sangat buruk pada berbagai sektor dunia usaha, sektor ekonomi menjadi sektor yang terdampak paling parah khususnya pariwisata dan transportasi mengingat lombok menjadi salah satu tujuan destinasi wisata. Sebagai konsekuensi, pertumbuhan ekonomi daerah akan menurun dramatis, dan tingkat kemiskinan penduduk akan meningkat tajam pada tahun 2020.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Implementasi Kebijakan

a. Implementasi Kebijakan

Menurut Affan Gafar dalam (Rizani, M. D., Rahayu, T. I., & Permana, I., 2021) Implementasi ialah langkah dari suatu proses kebijakan publik yang biasanya dilaksanakan setelah dirumuskannya kebijakan dengan tujuan yang jelas, implementasi juga termasuk rangkaian aktifitas dalam bentuk menghantarkan kebijakan yang dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Lasswell & Kaplan (1970) (dalam Herdiana, D., 2018) bahwa kebijakan adalah “*a projected program of goals, values and practices*”,

sedangkan definisi kebijakan menurut Anderson (2006) yaitu “*Policy is defined as a relatively stable, purposive courses of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” Pengertian menurut Anderson memiliki makna bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan aktor dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Wardhana, Y., 2019). adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Melakukan agenda *setting* ialah suatu langkah yang baik dalam menjalankan kebijakan publik karena dalam proses ini kita dapat mengetahui dan memaknai masalah publik dan juga prioritasnya. Penting juga dalam proses ini untuk menentukan suatu isu publik yang akan dibahas dalam Pemerintahan. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Penyusunan agenda kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat *urgensi* dan *esensi* kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.

b. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan biasanya sudah termasuk dalam agenda kebijakan yang kemudian dirundingkan kembali oleh pembuat kebijakan. Asal muasal pemecahan masalah ialah dari suatu alternatif atau pemilihan kebijakan yang sudah ada, dalam

tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar Pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Melalui proses ini orang belajar untuk mendukung Pemerintah.

d. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Implementasi berperan sebagai satu langkah dalam proses kebijakan publik yang melihat berjalannya suatu kebijakan, kebijakan ini dijalankan setelah mendapat formulasi kebijakan yang sah dan dijalankan dengan jelas serta memiliki tujuan (KM. Abdul, 2019). Edwards III (1980) mengemukakan: *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”* Edwards III telah

mempertimbangkan dan menawarkan empat faktor dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik.

Model implementasi kebijakan menurut Edwards III memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan.

Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika, terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. Berikut penjelasan Implementasi kebijakan menurut Edward III yang dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan tolak ukur keberhasilan dalam implementasi kebijakan, karena implementor dapat mengetahui hal atau langkah yang harus dilakukan agar terjalannya komunikasi yang baik, menghasilkan output tepat pada sasaran sehingga mengurangi tingkat kegagalan pada

implementasi. Agar implementasi kebijakan juga berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan.

Aktivitas komunikasi dalam rangka penyampaian pesan informasi kebijakan tersebut, harus pula memperhatikan bentuk komunikasi organisasi secara umum, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama, komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang diciptakan dan terbentuk secara terencana, melalui jalur-jalur formal dalam organisasi publik, yang melekat pada saluran-saluran yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan melalui struktur organisasi. Kedua, komunikasi non formal, adalah komunikasi yang ada di luar struktur organisasi publik, biasanya melalui saluran-saluran non formal yang munculnya bersifat insidental, menurut kebutuhan atau hubungan interpersonal yang baik, atau atas dasar kesamaan kepentingan. Inti dari kedua bentuk komunikasi tersebut bermuara pada penciptaan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara individual maupun kolektivitas dalam sebuah organisasi.

2. Sumber daya, setelah komunikasi berjalan dengan jelas dan lancar, implementor juga harus memperhatikan sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, sumber daya yang dimaksud ialah yang berwujud

sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya finansial (SDF). SDM dalam komponennya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, sedangkan SDF yaitu fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan

3. Disposisi, merupakan suatu karakteristik yang dimiliki oleh implementor, ketika muncul suatu sikap ataupun perspektif yang berbeda dari setiap pembuatan kebijakan, Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun, seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena, mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program, disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran keberhasilan program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-

orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Di samping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan. Tidak lancarnya proses implementasi dapat menjadi hal yang sangat berimbas dalam setiap langkah pembuatan kebijakan dan menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi, merupakan suatu hirarki atau tingkatan dalam berorganisasi. Setiap implementor memiliki tugas dan fungsi di masing-masing di setiap pengerjaan. Terdapat aspek dari struktur organisasi yaitu Hirarki dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Panjangnya suatu struktur organisasi akan membuat lemah pengawasan karena rumit. Edward III (dalam Subekti, 2017)

1.6.2 Pemerintah Desa Panggunharjo

Menurut Widjaja, 2003 (dalam Ulu et al., 2019) Pemerintah desa yakni suatu bagian yang muncul melalui pemerintah modern tetapi tetap mempunyai kewajiban untuk mengembangkan adanya barang-barang publik, juga melakukan pemungutan pajak. Desa ialah suatu kesatuan dalam masyarakat sipil yang memiliki hirarki asli bersifat istimewa. Hal utama yang diwajibkan mengenai Pemerintah desa ialah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan keanekaragaman. Penyelenggara pemerintah desa memiliki adanya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dan mengatasi permasalahan masyarakatnya, karena Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem

penyelenggara pemerintahan. Pemerintah Desa menyelenggarakan pemerintahan di Desa, dengan kewenangan pada bagian melaksanakan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, memberdayakan masyarakat desa, adanya pembinaan kemasyarakatan desa. (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

1.6.3 COVID-19

Covid-19 ialah suatu virus yang muncul pertama kali di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019, disebut Coronavirus disease-2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 (Issa, 2020). Menurut WHO, Covid-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus corona yaitu virus jenis baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019.

Penularan Virus Covid-19 bisa hanya dengan melalui percikan batuk atau bersin bahkan hanya dengan sentuhan dapat membawa virus bagi penderita. Orang lain yang menyentuh benda-benda terkontaminasi tersebut lalu menyentuh mata, hidung dan mulut mereka dapat tertular penyakit ini (WHO, 2020). Beberapa langkah pencegahan Covid-19 yang direkomendasikan oleh WHO pada tahun 2020 antara lain seperti Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau dapat menggunakan antiseptik berbahan alkohol. Deterjen pada sabun dan alkohol yang terdapat pada antiseptik dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.

a. Dampak COVID-19

Munculnya Covid-19 sangat mengganggu, selain memakan korban jiwa, hal ini juga meresahkan pada bidang ekspor dan impor yang ada di Indonesia,

penerimaan pajak juga menurun. Hal yang menyebabkan kejadian ini sangat berdampak karena penerimaan pajak dalam sektor perdagangan memegang kontribusi yang besar. (Nasution et al., 2020). Perekonomian Indonesia yang sudah menurun pada kuartal kedua tahun ini sebanyak 5,32% (bisnis.com/26 September 2020) selain itu dapat menimbulkan adanya perubahan sosial yang terjadi tanpa kehendak dari masyarakat, memang tidak dipungkiri bahwa perubahan dalam suatu tatanan bermasyarakat pastilah terjadi, tapi masyarakat pun tidak pernah menyangka dan membayangkan pandemi Covid-19 ini sebagai keadaan yang tetap dengan sekejap mata berada di dekat kita.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan guna terwujudnya program untuk memecahkan suatu permasalahan. Implementasi kebijakan diukur dengan menggunakan empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.7.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah sekumpulan orang yang bertugas menjalankan sistem pemerintahan yang ada di desa. Pemerintah Desa bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa juga dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan adat istiadat ataupun kondisi desa.

1.7.3 Program Merdesa dan PTC-19

Program Merdesa ialah suatu program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dengan menggabungkan hadirnya negara yang dipertemukan dengan kebudayaan sosial, dan mengkombinasikan kapasitas politik yang ada di Pemerintah Desa dengan kapasitas sosial budaya di warga desa.

PTC-19 atau panjangannya Panggung Tanggap Covid-19 merupakan suatu satuan gugus tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Panggungharjo untuk membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan dalam masa pandemi Covid-19, guna membantu masyarakat dalam penanganan dan mengurangi adanya dampak dalam masa pandemi.

1.7.4 Covid-19

Covid-19 adalah suatu wabah penyakit yang menyerang pernafasan manusia. Wabah Covid-19 ini dapat menular melalui kontak langsung dengan pasien terjangkit bahkan melalui udara. Penerapan pola hidup yang sehat dapat mengurangi rantai persebaran Covid-19.

Covid-19 kini telah menyebabkan dampak berimbas pada masyarakat, yang sangat dirasakan oleh seluruh warga yaitu dampak dalam aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek ekonomi.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III yang memiliki empat variabel, yaitu :

Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator
Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Merdesa dalam mengurangi Covid-19 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	Komunikasi	1. Komunikasi Formal 2. Komunikasi Informal
	Sumber Daya	1. Sumber daya manusia 2. Sumber Daya Finansial
	Disposisi	1. Perbedaan karakteristik implementor 2. Hambatan dalam proses implementasi
	Struktur Birokrasi	1. Hirarki 2. SOP

1.7 METODOLOGI PENELITIAN

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mengeluarkan suatu data berupa kata-kata tulisan, bahkan suatu ucapan manusia yang sedang diamati dalam (Habsy, 2017). Menurut Krisyantono dalam (Mahardika, R. D., & Farida, F., 2019) mengatakan bahwa tujuan dari adanya pendekatan deskriptif yaitu sebagai fakta-fakta dari suatu objek. Pengamatan ini membuat suatu kenyataan yang terjadi bahkan tidak perlu adanya penjelasan antar variabel.

1.7.2 Jenis Data

Dari penelitian ini mengambil jenis sekunder. Menurut Sugiyono dalam (Arifin, Z., 2020) Penelitian sekunder merupakan sumber data yang diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data, dengan mengambil melalui

literatur dan studipustaka. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi melalui hasil wawancara dan mendapatkan segala kebutuhan data dari *website* resmi Desa Panggungharjo atau artikel yang valid kebenarannya.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, terdapat instrument penting dalam menyusun suatu penelitian. Menurut Arifin dalam Buku Kristanto, 2018 berjudul Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Kristanto, Observasi atau pengamatan langsung merupakan suatu langkah yang harus lebih dahulu dengan pengamatan dan dilanjut dengan pencatatan yang bersifat sistematis, logis, obyektif dan rasional terhadap setiap kejadian dalam keadaan yang sebenarnya ataupun buatan. Observasi dilakukan pada Desa Panggungharjo khususnya pada gugus tugas yang menanggapi program pengurangan dampak Covid-19 pada Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab pada orang yang bersangkutan dan mendapatkan informasi yang dapat dijadikan info dalam suatu penelitian. Yusuf, 2014 mengemukakan bahwa :

“Wawancara sebagai salah satu sistem yang bisa digunakan dalam melakukan pengumpulan data penelitian, juga bisa dikatakan sebagai adanya proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang-orang yang diwawancarai dengan melakukan secara langsung bertatap muka ataupun via *skype, zoom, google meet* atau aplikasi lainnya.”

Wawancara dilakukan peneliti dengan menanyakan kepada :

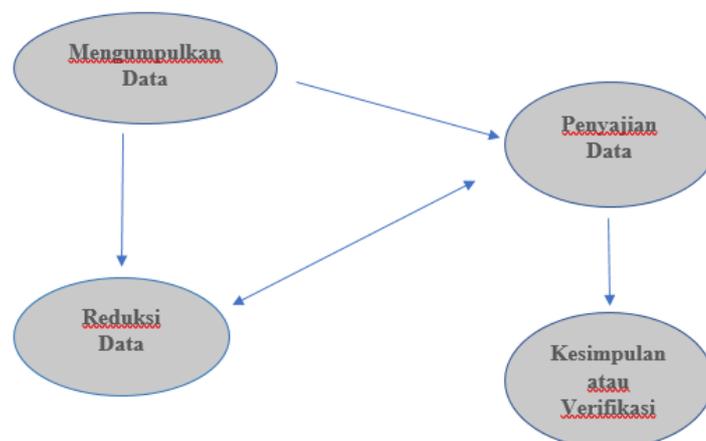
Unsur	Informan
Pemerintah Desa	1. Lurah 2. PTC-19 bagian Pelayanan
Tokoh Masyarakat	1. Kepala Dukuh Krapyak Kulon 2. Puskesmas Sewon II 3. Ketua Karang Taruna
Masyarakat	1. Masyarakat terdampak covid-19

Sedangkan teknik dokumentasi dapat berupa suatu tulisan teks, surat kabar, majalah, biografi, kebijakan, karya, *life history* , bahkan dapat juga berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, lukisan, dan lain-lain (Sugiyono 2015).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian yakni kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono, 2015 analisis deskriptif ialah suatu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan melampirkan data yang telah terkumpul sesuai fakta. Menurut Miles dan Huberman terdapat empat langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu :

Gambar 1 Empat Langkah dalam Analisis Data



Sumber : Diagram dikembangkan oleh penulis

1. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data ialah sebuah investigasi informasi dengan menulis secara objektif menggunakan hasil wawancara dari Kepala Desa, unit gugus tugas Covid-19 ataupun masyarakat.

2. Reduksi data

Reduksi data ialah suatu kegiatan yang memperoleh informasi dan siap untuk diolah, hal ini dilakukan berasal dari suatu penyederhanaan dengan cara melakukan seleksi pada suatu data biasa disebut reduksi data.

3. Penyajian Data

Informasi yang biasanya dirapihkan untuk memberikan suatu kesimpulan, dan dilanjutkan dengan tindakan.

4. Penyimpulan dan Verifikasi

Suatu informasi yang sudah diseleksi dan diolah dengan cara terstruktur kemudian dirangkum, dan ranguman ini bersifat sementara. Jika data sudah jelas, kemudian melakukan verifikasi. Pada bagian ini berisikan ringkasan berbentuk sementara yang didapat dari penelitian, jika ringkasan sudah diverifikasi maka akan menjadi kesimpulan akhir.